

REFLEKSI PENDIDIKAN NILAI BANGSA KITA

Agus Triyanto

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan

Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract. *The discussion in this article starts from the emergence of a variety of problems and global issues such as violation of human rights, multi-cultural-ethnic-religious reality, life environment, world peace, violence phenomena, and drug abuse which indispensably make educational practitioners think about an appropriate educational system capable of facing challenges. Therefore, an educational system focusing on moral value internalization emphasizing the aspect of universal humanism is important. Such a system should be adjusted to our needs in order for us as a nation to be able to face every challenge. The past education was deemed to fail to create people capable of individualizing and participating. As a result, our educational outputs are not only poor in skill and intellectual capacity but also fragile in character and morality. A national problem arising is not only unemployment and alumni's poor capability but also a threat of moral decadence and criminality.*

The fact that the reform euphoria brings about effects on all aspects of the nation's life, initially directed towards substantial matters, shows that it still needs a long struggle to attain the reform objective. In fact, our nation needs not only characters with morality but also those with intellect, capable of thinking clearly and profoundly, idealistic and realistic, and having a long-term vision. Those with intellect are able to see the invisible, to see what is behind an emergent phenomenon, and to raise appropriate critical questions. Not all people are able to see a variety of moral problems that are usually behind emergent phenomena.

The conclusion of this article is that to prevent moral values prevalent in society from extinction, the society itself has to transfer them to the next generation. A way to do so is education. Through education, the society teaches knowledge, concepts of live, norms, and attitudes in social life, and teaches how to behave in social life, nation life, and government life.

Key words : *nation, value education, character, moral*

PENDAHULUAN

Beragam masalah yang muncul dan isu-isu global seperti pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM), realitas multibudaya-etnik-agama, lingkungan hidup, perdamaian dunia, fenomena kekerasan dan penyalahgunaan narkoba, secara langsung maupun tidak langsung akan memaksa para praktisi pendidikan memikirkan sistem pendidikan manakah yang dianggap paling cocok untuk menjawab tantangan zaman. Dengan demikian akan menjadi penting sistem pendidikan yang memberi perhatian besar pada internalisasi nilai moral dengan tekanan pada aspek humanisme

universal. Apalagi bila ini dilakukan dengan kepentingan dan kebutuhan kita sebagai bangsa yang ingin menjawab setiap tantangan zaman.

Berangkat dari fakta bahwa euforia reformasi membawa dampak dalam berbagai aspek kehidupan nasional, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan tak luput dari itu juga apresiasi masyarakat atas nilai-nilai filosofis dan ideologis. Reformasi yang pada awalnya diarahkan pada hal-hal yang substansial menuju terwujudnya kehidupan ideal. Realitasnya, reformasi seringkali dimaknai sebagai perubahan semata-mata. Akibatnya, segala sesuatu yang ada pada masa lalu serta merta dianggap sebagai sesuatu yang usang dan harus diganti dengan yang baru.

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU No. 2 Tahun 1989. UU Sisdiknas mengatakan dalam Pasal 3 "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Jelas terlihat bahwa pembinaan kepribadian bangsa menjadi landasan utama sistem pendidikan nasional yang sarat dengan muatan nilai-nilai. Bagaimana mungkin murid dan mahasiswa dalam lingkup kependidikan nasional dibiarkan tidak mengetahui dan memahami nilai-nilai budaya sendiri. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan penyegaran kembali dalam ingatan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan nilai dan watak sebagai wahana pembinaan kepribadian bangsa.

Sistem pendidikan yang otoriter yang terjadi di masa lalu dan terlalu tergantung pada kekuasaan yang berlangsung selama tiga puluh dua tahun, juga berdampak serius terhadap perkembangan pendidikan kepribadian di sekolah. Pemberian apresiasi otonom untuk mengembangkan potensi keunikan diri masing-masing, para siswa malah harus menerima bentuk moral seragam yang sama sekali mengabaikan pendekatan afektif dalam proses pembelajarannya. Inilah alasan yang paling rasional untuk menjawab pertanyaan penting yang kini banyak diajukan; mengapa reformasi yang didengung-dengungkan itu justru hanya melahirkan manusia-manusia tidak bermoral seperti koruptor, preman, pelacur, pengkhianat, dan sebagainya. Ironisnya, hal ini terjadi justru ketika bangsa ini mendambakan manusia-manusia berkepribadian, memiliki integritas moral, dan akhlak yang mulia. Akar dari ironi yang menampakkan ambivalensi ini harus ditemukan untuk dijadikan dasar bagi langkah berikutnya yang lebih baik.

Pelajar dan mahasiswa sebagai bagian dari komunitas terdidik, memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadikan dirinya manusia dewasa berkepribadian mulia. Salah satu karakter pribadi dewasa adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan secara bijak, mengedepankan akal daripada okol, membangun empati, memperkuat humanisme dan rasa persaudaraan sesama. Pada titik ini, agama mempunyai kekuatan dalam membangun harkat dan martabat manusia dan masyarakat.

PEMBAHASAN

Pendidikan Kepribadian Berbasis Sekolah

Harapan dan tumpuan masa depan bangsa, tidak dapat dipungkiri akan dilimpahkan kepada peran dunia pendidikan. Sejumlah kerusakan dan kemunduran dalam ragam aspek kehidupan, kini dinilai sebagai akibat dari tidak berfungsinya sistem pendidikan kita dalam mengembangkan pribadi-pribadi handal yang memiliki kesadaran terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan divonis telah gagal menghasilkan pribadi yang mampu melakukan individuasi dan partisipasi. Akibatnya, luaran pendidikan kita bukan hanya miskin dalam kapasitas skill dan intelektual, tetapi juga rapuh dalam karakter dan moral. Problem nasional yang muncul sesudahnya bukan hanya menyangkut pengangguran dan keahlian rendah para alumnus, tetapi juga melebar kepada ancaman kerusakan moral dan kriminalitas. Memang, untuk memperbaiki keteringgalan dalam hal pertama, konsep *link and match* selama ini sudah coba diupayakan dalam berbagai bentuk program, tetapi masalah yang terakhir nyaris belum tersentuh secara serius.

Kenyataan ini tentu saja patut dijadikan keprihatinan tersendiri bagi dunia dan insan pendidikan di Indonesia. Bagaimanapun, sekolah dalam sistem pendidikan kita masih memegang posisi yang sangat menentukan bagi perkembangan kepribadian siswa. Secara kuantitatif, siswa kita menghabiskan hampir separuh dari waktunya setiap hari. Amat disayangkan jika waktu sebanyak itu tidak dimanfaatkan untuk merancang program pembelajaran yang khusus ditujukan untuk pembinaan dan pengembangan kepribadian siswa. Dengan menerapkan beberapa model pendidikan kepribadian yang ada, sekolah sesungguhnya dapat dioptimalkan untuk mendidik siswa-siswinya lebih manusiawi, dengan pendekatan belajar menyenangkan, dan berorientasi pada pembentukan karakter.

Menurut Mulyadi (1997) di Amerika Serikat, peningkatan gejala-gejala penyimpangan moral yang terjadi seperti bunuh diri, penyalahgunaan obat terlarang, aborsi di kalangan remaja, seks bebas, dan berbagai tindak kriminal, telah memicu orang seperti Thomas Lincona. Thomas Licona menulis sebuah buku yang khusus berbicara pendidikan nilai-nilai kepribadian bagi anak sekolah, "*Educating for Character*." Bagi Lincona, peningkatan gejala-gejala semacam itu tidak lepas dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat di bidang pendidikan sejak tahun enampuluhan. Saat itu, pendidikan nilai-nilai moral di sekolah dipandang tabu dalam sistem pendidikan. Alasannya, pendidikan nilai moral di sekolah umum, merupakan bentuk pemaksaan nilai-nilai tertentu kepada siswa yang pluralis, sehingga nilai-nilai moral tertentu dianggap sebagai suatu yang sangat subyektif. Lincona lalu mengusulkan dua nilai moral dasar yang harus diajarkan kepada siswa di sekolah, yaitu persoalan *respect* dan *responsibility*. *Respect* yang mencakup tiga hal—penghargaan terhadap diri sendiri, terhadap segala bentuk kehidupan, dan lingkungan hidup—merupakan sisi "larangan" moralitas yang mengajarkan apa yang sebaiknya jangan dilakukan. Sedangkan *responsibility* merupakan sisi "tanggung jawab" yang mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan.

Kiranya kutipan Mulyadi (1997) terhadap pendapat John P. Miller yang adalah seorang ahli pendidikan dari *Ontario Institute for Studies in Northwestern Center*, dapat dijadikan rujukan. Miller menawarkan sejumlah model pembelajaran yang

mampu menumbuhkan daya kreatif siswa sehingga tumbuh menjadi pribadi yang **cerdas sekaligus memiliki** keluhuran budi. Ia menuangkan gagasannya tersebut dalam sebuah buku berjudul "*Humanizing The Class Room; Models of Teaching in Affective Education*." Dalam buku tersebut, Miller memperkenalkan 17 model pembelajaran yang dapat dipilih oleh pelaku pendidikan dalam penerapan di kelas sesuai dengan keberadaan anak dan lingkungan yang mengitarinya.

Ketujuhbelas model tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat rumpun model, yakni (1) pengembangan (*developmental*), (2) konsep diri (*self-concept*), (3) kepekaan dan orientasi kelompok atau sosial (*sensitivity and group orientation*), dan (4) perluasan kesadaran (*consciousness-expansion*). Guru dan praktisi pendidikan di sekolah, selanjutnya dapat memilih model-model tersebut dengan mempertimbangkan dua hal; *pertama*, tujuan dan kepentingan yang menjadi prioritas bagi guru/fasilitator dalam proses pembelajaran yang ditanganinya. *Kedua*, dengan memperhatikan dan menyesuaikan struktur dan suasana lingkungan yang mengitari anak didiknya.

Memang, kesadaran dan tanggungjawab untuk menyelamatkan bangsa dari kerusakan dan kebejatan moral, seharusnya tidak hanya dilimpahkan kepada insan dan institusi pendidikan semata. Ini merupakan kerja besar dan mulia serta sangat mendesak, yang wajib dipikul bersama, termasuk oleh elit bangsa yang kini duduk di pentas politik puncak.

Adanya keberagaman nilai yang dianut masyarakat adalah suatu fakta dan tetap harus dihormati. Apabila nilai-nilai moral memang harus diajarkan, lalu nilai-nilai mana yang harus diajarkan? Dalam kaitan ini masih menurut Mulyadi (1997) Lickona mengusulkan dua buah nilai moral dasar: *respect* dan *responsibility*. Kedua nilai ini oleh Lickona dianggap sebagai inti dari moralitas yang secara universal dianut oleh umat manusia.

Yang dimaksud dengan *respect* adalah penghargaan atau hormat atas keberadaan seseorang atau sesuatu. Ada tiga bentuk *respect*: penghargaan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap segala bentuk kehidupan dan lingkungan hidup. Nilai ini menuntut seseorang memperlakukan makhluk hidup lain, bahkan yang sangat tidak kita sukai, sesuai dengan harga diri dan haknya yang setara dengan diri sendiri. Inilah inti dari "*golden rule*" yang berbunyi: "*Do unto others as you would have them do unto you*". *Respect* adalah sisi "larangan" dari moralitas. *Respect* mengajarkan apa yang sebaiknya jangan dilakukan.

Responsibility secara etimologis dalam bahasa Inggris berarti "*the ability to respond*". Dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan sebagai "tanggung jawab" dan terkandung unsur "jawab", artinya menjawab secara aktif tuntutan dari luar diri. *Responsibility* adalah sisi "keharusan" dari moralitas. *Responsibility* mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan.

Dari kedua nilai moral dasar ini dapat diperoleh nilai-nilai lain yang merupakan variannya. Misalnya nilai "jangan menyakiti sesama manusia" merupakan varian dari nilai *respect*, karena dengan menyakiti sesama manusia seseorang berarti tidak menghargai keadaan orang lain. Pada pelaksanaannya dalam pendidikan, kedua nilai dasar ini memang harus dibuatkan turunannya.

Mengetahui nilai apa yang benar, dan melakukan apa yang benar adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat saja sekaligus mengetahui apa yang benar dan tidak melakukannya atau bahkan melakukan kebalikan dari apa yang diketahui benar itu. Oleh karena itu menurut Lickona, pengetahuan nilai moral saja tidaklah cukup. Nilai moral perlu disertai dengan adanya karakter bermoral. Termasuk dalam karakter ini adalah pengetahuan moral (*moral knowing*), rasa moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*). Di dalam pengetahuan moral terkandung: 1. Kesadaran moral (*moral awareness*), 2. Mengetahui nilai moral, 3. Perspective-taking, 4. Penalaran moral (*moral reasoning*), 5. Pembuatan keputusan, 6. Pengetahuan diri (*self-knowledge*). Rasa moral terdiri atas: 1. Nurani(*conscience*); 2. Penghargaan diri (*self-esteem*); 3. Empati; 4. Cinta kebaikan; 5. Kontrol diri; 6. Humility. Sedangkan tindakan moral terdiri atas : 1. Kompetisi; 2. Kehendak (*will*); 3. Kebiasaan (*habit*)

Nilai moral dan karakter inilah yang seharusnya dimiliki oleh warga masyarakat dimana sekolah memegang peran yang penting dalam pembentukannya. Daftar kualitas yang diberikan Lickona ini dapat menjadi semacam taksonomi dalam pendidikan nilai dan karakter.

Tantangan untuk Pendidikan Nilai

Sebenarnya yang diperlukan oleh bangsa kita ini bukan saja karakter yang bermoral, namun juga cerdas, yang dapat berpikir jernih dan dalam, idialis sekaligus realis, serta memiliki pandangan jauh ke depan. Cerdas yang dimaksud di sini bukan hanya pintar menyelesaikan perhitungan matematik, membangun jalan layang, mencari peluang bisnis untuk akumulasi kekayaan. Namun cerdas dapat juga berarti mampu melihat apa yang tidak segera terlihat, mampu melihat apa yang ada di balik gejala yang muncul, dan mampu melontarkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang tepat. Tidak semua orang dapat melihat adanya berbagai permasalahan moral yang biasanya berada dibalik gejala-gejala yang terlihat.

Para pemimpin dan pendiri bangsa kita seperti Ir. Soekarno, Hatta, dan Sutan Sjahrir dapat kita jadikan contoh. Dengan bekal pendidikan kolonial mereka dapat melihat adanya penindasan di dalam struktur pemerintah kolonial. Melihat hal itu, mereka tidak cuma mencari selamat, tetapi nurani merekapun terpanggil untuk bekerja menghapuskan struktur penindasan tersebut.

Beban yang disandangkan pada dunia pendidikan di Indonesia akan semakin berat. Karena selain diharapkan membangun manusia bermoral, juga diharapkan menghasilkan manusia yang cerdas dan berpikir jernih. Ki Hajar Dewantoro memiliki filsafat pendidikan yang kita kenal "ing arso asung tulodho, ing madyo mbangun karso, tut wuri handayani" (keteladanan, motivasi dan pemberdayaan). Dalam rangka pendidikan nilai/budi pekerti KETELADANAN merupakan cara atau metode yang penting bahkan mutlak untuk dilaksanakan. Maka untuk pendidikan ini KETELADANAN dari para orang dewasa (orangtua, guru, kakak, atasan, pembesar dst..) mutlak untuk dihayati. Keteladanan dalam perilaku atau tindakan dan kata-kata. Bukankah saat ini yang terjadi adalah krisis keteladanan?

Tayangan-tayangan di media masa yang nampak pada masa kini perlu memperoleh perhatian serius, misalnya: siaran televise, CD dan VCD, hiasan-hiasan

di dinding, gambar-gambar iklan di jalanan, perilaku para orang dewasa. Dengan demikian apa yang ia lakukan dengan mudah akan tersiar atau diceritakan dari mulut ke mulut dan kemungkinan sangat besar terjadi ceritera itu sampai ke telinga setiap orang tidak terkecuali anak-anak kita. Dan jika hal ini terjadi akibatnya akan fatal. Karena sesungguhnya penyelewengan seorang suami / istri, terjadinya korupsi dan lain sebagainya dimanapun merupakan keteladanan. Untuk menjawab tantangan itu di dalam hidup diperlukan sikap yang lurus penuh dengan kejujuran dan kedisiplinan.

PENUTUP

Setiap masyarakat mempunyai nilai yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Tetapi, pada hakikatnya terdapat persamaan yang bersifat universal, yaitu bahwa aturan-aturan atau norma hidup itu dianut demi kebaikan. Dengan aturan yang ada itulah diharapkan akan terjadi suatu kehidupan masyarakat yang harmonis.

Agar semua nilai yang dianut oleh masyarakat tidak musnah, maka masyarakat itu harus mentransformasikannya kepada generasi berikutnya. Jalan untuk melaksanakan usaha tadi, tidak lain adalah pendidikan. Melalui pendidikan inilah masyarakat mengajarkan ilmu pengetahuan, konsep kehidupan yang dianut, norma dan sikap dalam pergaulan hidup serta mengajarkan bagaimana cara bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Masyarakat dalam hal ini sebagai sistem dan juga lingkungan pendidikan. Lebih jauh dikatakan, bahwa pendidikan merupakan produk atau hasil dari kehidupan masyarakat itu sendiri dan dia tumbuh di dalam suatu masyarakat (*education is the result of living and growing up in a community*). Jadi dalam kaitan ini, pendidikan dan kebudayaan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan merupakan sarana bagi terciptanya kebudayaan suatu masyarakat.

Dalam mengemban tugasnya, pendidikan memiliki dua sifat yakni sifat reflektif dan progresif. Reflektif, mengandung arti bahwa pendidikan harus berusaha menyampaikan nilai-nilai kehidupan yang dianut dan berlaku di masyarakat. Lebih jelasnya, pendidikan harus memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai sosiokultural dan membina generasi muda untuk mengamalkannya, sehingga mereka dapat hidup di masyarakat dengan baik. Kepada generasi muda juga perlu disampaikan bahwa mereka harus ikut bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian nilai-nilai hidup yang telah dimiliki oleh lingkungan masyarakat dan bangsanya yang bersumber pada pandangan hidup masyarakat dan bangsanya itu. Berarti pula mereka harus turut serta bertanggung jawab untuk melestarikan kehidupan.

Progresif, menuntut para pelaksana pendidikan (guru, sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah) harus menyiapkan anak didik agar dapat dan mau melihat jauh ke depan (*visioner*), ke suatu masa yang mungkin penuh dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam usaha mencapai tujuan kehidupannya.

Dengan demikian pendidikan tidak hanya berkewajiban menularkan nilai-nilai budaya yang telah ada, tetapi juga membina generasi untuk dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang didalamnya antara lain berisi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial-budaya, perkembangan ekonomi dan sebagainya.

Jika pendidikan tidak berhasil memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan perkembangan tersebut, generasi muda tidak akan sanggup mengikuti dinamika kehidupan yang semakin menuntut kemampuan hidup yang tinggi, ia akan ketinggalan zaman dan akan berakibat tidak dapat menghadapi masalah kehidupan yang nyata.

Mengutip pendapat Nurulpaik dalam Pikiran Rakyat, 2005: Sejatinya pendidikan yang kita lakukan sekarang "pendidikan hari ini adalah pendidikan untuk hari esok" (*education today is education for tomorrow*). Pendidikan harus hidup, terbuka dan tumbuh tidak hanya mengawetkan nilai-nilai lama, tetapi harus mempelajari nilai-nilai baru. Ia memiliki kemampuan untuk selalu memperbarui dirinya sendiri karena ia bersifat terbuka untuk inovasi. Ia berjalan ke depan, bukan ke belakang.

DAFTAR PUSTAKA :

- Dewey, John. 2002. *Pengalaman dan Pendidikan*. Alihbahasa: John de Sato. Kepel Press, Yogyakarta.
- Kartono, ST. 2001. *Menabur Benih Keteladanan : Kumpulan Esai Seorang Guru*. Kepel Press, Yogyakarta
- Mulyadi, Eric. 1997. Pendidikan Karakter dan Nilai Moral (Tinjauan atas buku Thomas Lickona " *Educating for Character*". Dalam Bina keluarga - Karya Wiyata 82 Tahun XX Mei-Juni 1997
- Nurulpaik, Iik. 2005. "Pendidikan dan Budaya". Dalam *Pikiran Rakyat* 26 Maret 2005. Bandung.
- Purnawan, Amin. 2005. "Pendidikan Pancasila dan Kepribadian". Dalam *Suara Merdeka* 25 Agustus 2005. Jakarta.